



Judul : Baleg DPR: Cegah revisi UU PPP jadi pembenaran
Tanggal : Jumat, 08 April 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

3

KILAS POLITIK & HUKUM

Baleg DPR: Cegah Revisi UU PPP Jadi Pembenaran

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas, mengingatkan agar pemerintah dan DPR tidak hanya fokus pada perbaikan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi bukan semata UU PPP, tetapi juga UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. "Jangan sampai perbaikan UU menjadi sarana legitimasi atau pembenaran atas kekeliruan saat menyusun UU Cipta Kerja," ujar Supratman, Kamis (7/4/2022). (REK)